



## **Pengaruh struktur kepemilikan terhadap *audit fee* dengan pendekatan regresi data panel lintas negara**

### ***The influence of ownership structure on audit fees using a cross-country panel data regression approach***

**Nurdiana Alhafsoh\*, Raden Arief Wibowo**

Universitas Peradaban, Brebes, Indonesia

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Audit Fee* dengan pendekatan data panel lintas negara. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia periode 2021-2023 yang berjumlah 956 Perusahaan. Teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan menghasilkan 465 perusahaan yang terpilih sebagai sampel dengan total 1395 observasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel menggunakan aplikasi *eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan Bursa Efek Indonesia dan Malaysia, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan Bursa Efek Indonesia dan tidak berpengaruh di seluruh Perusahaan Bursa Efek Malaysia, Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan Bursa Efek Indonesia dan berpengaruh positif di seluruh Perusahaan Bursa Efek Malaysia, Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan Bursa Efek Indonesia dan Malaysia.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Asing, *Audit Fee*.

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of ownership structure on audit fees using a cross-country panel data approach. The population in this study comprises all companies listed on the Indonesia Stock Exchange and the Malaysia Stock Exchange for the period 2021-2023, totaling 956 companies. The sampling technique used was purposive, resulting in the selection of 465 companies with a total of 1395 observations. The analysis technique used was panel data regression with Eviews 12. The results showed that managerial ownership had no effect on audit fees in all companies listed on the Indonesia and Malaysia Stock Exchanges. Institutional ownership has a negative effect on audit fees in all Indonesian Stock Exchange companies and no effect in all Malaysian Stock Exchange companies. Government ownership has no effect on audit fees in all Indonesian Stock Exchange companies and a positive effect in all Malaysian Stock Exchange companies. Foreign ownership has a positive effect on audit fees across all companies listed on the Indonesian and Malaysian Stock Exchanges.*

**Keywords:** Managerial Ownership, Institutional Ownership, Government Ownership, Foreign Ownership, *Audit Fee*.

#### **Histori Artikel:**

Diterima 30 Oktober 2025, Direvisi 4 Desember 2025, Disetujui 7 Desember 2025, Dipublikasi 11 Desember 2025.

#### **\*Penulis Korespondensi:**

dianahafsoh@gmail.com

#### **DOI:**

<https://doi.org/10.60036/jbm.925>

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, termasuk transparansi laporan keuangan dan praktik audit (Munisi, 2023). ASEAN mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2023 dan diperkirakan tumbuh 4,6% pada 2024, dengan Indonesia mencatat pertumbuhan 3,9% dan Malaysia 4,2%, serta pendapatan per kapita masing-masing USD 5.270 dan USD 13.310 (Nursyahrani et al., 2025; Saptani, 2023). Perbedaan kondisi ekonomi dan sistem regulasi di kawasan ini menimbulkan implikasi penting terhadap praktik *Audit Fee* lintas negara.

*Audit Fee* merupakan imbalan atas jasa audit laporan keuangan yang merepresentasikan kompleksitas audit, risiko yang ditanggung auditor, serta kualitas tata kelola perusahaan (Andriyani & Laksito, 2017). Di Indonesia, *Audit Fee* tidak memiliki ketentuan tarif minimum dan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara auditor dan perusahaan (Wibowo & Parasetya, 2024). Sebaliknya, Malaysia menerapkan kewajiban pengungkapan *Audit Fee* melalui Bursa Malaysia di bawah pengawasan Malaysian Institute of Accountants (MIA), sehingga tingkat transparansinya relatif lebih tinggi (Nelson & Mohamed-Rusdi, 2015). Perbedaan regulasi ini menegaskan perlunya kajian lintas negara mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Audit Fee*.

Selain regulasi, struktur kepemilikan perusahaan juga berpengaruh dalam menentukan besaran *Audit Fee*. Kepemilikan manajerial, institusional, pemerintah, dan asing berperan sebagai mekanisme pengawasan internal yang dapat memperkuat atau melemahkan kebutuhan audit eksternal. Di Indonesia, kasus PT Indofarma Tbk yang merugikan negara sebesar Rp371,8 miliar (Sandi, 2024) serta manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Hartomo, 2019) menjadi bukti lemahnya penerapan standar audit. Sementara itu, di Malaysia, skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menunjukkan bagaimana kurangnya transparansi audit dapat berdampak besar terhadap stabilitas keuangan negara (Tysara, 2025). Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa *Audit Fee* tidak sekadar soal biaya, melainkan instrumen penting dalam menjaga integritas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu memberikan hasil seperti, penelitian Munisi (2023) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif. Di sisi lain, penelitian Alves (2023) menemukan hasil berbeda di konteks Eropa, bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian, khususnya dalam konteks negara berkembang dengan sistem kelembagaan yang berbeda seperti Indonesia dan Malaysia.

Pemilihan Indonesia dan Malaysia sebagai objek penelitian didasarkan pada kesamaan karakteristik keduanya sebagai negara berkembang di kawasan ASEAN yang menganut standar pelaporan keuangan berbasis IFRS dan memiliki pasar modal yang aktif, sehingga relevan untuk dianalisis secara komparatif. Selain itu, kedua negara memiliki regulasi tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan yang relatif mirip sebagai bagian dari sistem emerging market, namun menunjukkan tingkat efektivitas pengawasan yang berbeda. Misalnya, penelitian Kalsum, Fuadah, & Safitri (2021) menemukan bahwa mekanisme good corporate governance di Indonesia masih memiliki variasi kualitas antar perusahaan, sehingga dapat berpengaruh terhadap struktur *audit fee*. Sementara itu, studi Abd Rahim & Yusof (2018) menunjukkan bahwa di Malaysia, mekanisme tata kelola internal terutama kompetensi komite audit memiliki pengaruh kuat dalam menentukan *audit fee*.

Perbedaan tersebut mencerminkan variasi dalam penegakan regulasi dan praktik audit di kedua negara. Malaysia memiliki Malaysia Code on Corporate Governance (MCCG) yang lebih matang dan konsisten diterapkan, sedangkan Indonesia masih mengalami perkembangan dalam penerapan good governance dan transparansi laporan keuangan. Selain itu, peran *audit fee* terhadap kualitas audit juga berbeda antar negara. Ganesan et al. (2019) menunjukkan bahwa

audit fee di Malaysia terkait erat dengan kualitas audit dan pengawasan pasar, sedangkan Farooq et al. (2018) menegaskan bahwa audit fee di negara berkembang umumnya dipengaruhi oleh karakteristik kepemilikan dan kualitas tata kelola. Kombinasi persamaan dan perbedaan konteks regulasi inilah yang membuat Indonesia dan Malaysia menjadi pasangan negara yang tepat untuk dianalisis secara perbandingan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor penentu audit fee di kawasan ASEAN.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan yang mencakup kepemilikan manajerial, institusional, pemerintah, dan asing terhadap *Audit Fee*. Dengan menggunakan pendekatan regresi data panel lintas negara, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Audit Fee* pada perusahaan publik di Asia Tenggara.

Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi dengan menghadirkan bukti empiris lintas negara mengenai hubungan struktur kepemilikan dan *Audit Fee*, yang selama ini lebih banyak diteliti dalam konteks domestik (Anindita & Rohman, 2021; Munisi, 2023). Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi auditor dalam menentukan strategi pemeriksaan, bagi regulator seperti OJK dan MIA dalam merumuskan kebijakan transparansi *Audit Fee*, serta bagi akademisi sebagai pijakan untuk penelitian lanjutan di bidang tata kelola perusahaan dan praktik audit lintas negara.

Dari latar belakang di atas, meningkatkan keinginan peneliti untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap *Audit Fee* dengan pendekatan regresi data panel negara dengan indikator variabel, objek, dan tahun penelitian yang berbeda.

## LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan principal. Teori ini menjelaskan bagaimana pemisahan antara pemilik dan manajer dapat menimbulkan masalah keagenan. Hubungan keagenan (*agency relationship*) merupakan hubungan yang terjadi antara pihak-pihak tersebut (principal dan agen). Dalam penelitian ini, pihak agen merujuk pada manajemen Perusahaan, sedangkan principal adalah pemegang saham. Principal memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen karena agen dianggap memiliki pemahaman dan informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi dan kinerja Perusahaan.

Manajemen akan berupaya menjadi kinerja Perusahaan agar tetap baik demi mempertahankan kepercayaan pemegang saham terhadap laporan keuangan. Untuk itu, manajemen memerlukan jasa Akuntan Publik guna memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara akurat dan dapat dipercaya (Nuraini & Ichi, 2022). Pemegang saham (*principal*) membutuhkan pihak ketiga, yaitu auditor untuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Auditor berperan sebagai penghubung antara prinsipal dan agen, memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan akurat, andal, dan dapat dipercaya.

### Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal (*Signaling Theory*) dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973, sinyal diartikan sebagai tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada investor. Teori sinyal berlandaskan pada asumsi bahwa setiap pihak tidak memiliki tingkat informasi yang sama. Asimetri informasi muncul ketika pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajemen. Namun, manajemen tidak selalu mengungkapkan seluruh informasi yang dimilikinya kepada pemegang saham (Viyati et al., 2024). Informasi asimetri ini dapat dikurangi melalui sinyal informasi.

Dalam konteks lintas negara, Malaysia mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan biaya audit secara rinci, sehingga investor memandang hal tersebut sebagai praktik yang mencerminkan kepatuhan serta akuntabilitas perusahaan. Sementara itu, Indonesia dengan tingkat pengawasan dan transparansi yang relatif rendah, praktik penetapan biaya audit masih dipengaruhi oleh persaingan ketat dan lemahnya system pengawasan (D. P. Sari, 2022). Dengan demikian, teori sinyal memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana perusahaan di kedua negara tersebut mengelola biaya audit sebagai bentuk sinyal strategi kepada pasar dan para pemangku kepentingan dengan tujuan membangun kepercayaan serta meningkatkan reputasi perusahaan.

### **Audit Fee**

Menurut Widari et al., (2023), *Audit Fee* adalah pembayaran yang diterima oleh Akuntan Publik sebagai imbalan atas jasa audit yang diberikan, yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti resiko penugasan, kompleksitas jasa, dan tingkat kompetensi yang diperlukan. Selain itu, *Audit Fee* juga mempengaruhi ketersediaan jasa audit, kualitas audit, dan pertimbangan professional lainnya. Pemberian *Audit Fee* yang tinggi dapat memotivasi auditor untuk bekerja lebih keras dan teliti dalam melakukan audit, sehingga menghasilkan opini audit yang berkualitas dan akurat.

Menurut Louw & Indah (2024), *Audit Fee* yang tinggi juga dapat meningkatkan kinerja auditor karena memungkinkan mereka memiliki sumber daya cukup untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mengevaluasi bukti secara efektif dan efisien. *Audit Fee* umumnya ditetapkan melalui kesepakatan antara auditor dan klien sebelum proses audit dimulai, serta dicantumkan dalam kontrak kerja yang disetujui oleh kedua pihak (Taufiqah Julia Wardani et al., 2022). Dengan demikian, auditor dapat merasa bahwa pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka dan menghasilkan laporan audit independen yang berkualitas.

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan Manajerial mengacu pada kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Novriansa et al. (2023), menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan biaya audit. Hal ini sama dengan penelitian Wibowo & Parasetya (2024), yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya audit dalam teori keagenan. Dalam konteks ini, biaya audit cenderung lebih rendah pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan akan prosedur audit mendalam karena manajemen dianggap insentif lebih besar untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan. Oleh karena itu, perusahaan yang dimiliki kepemilikan manajerial yang tinggi umumnya menanggung beban biaya audit yang rendah. Jadi dengan adanya kepemilikan manajerial yang tinggi diyakini mampu menurunkan audit fee karena berkurangnya konflik keagenan.

**H<sub>1</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Audit Fee.**

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh entitas kelembagaan seperti instansi pemerintah saham, lembaga perbankan, dan institusi keuangan lainnya, baik yang berasal memiliki dalma negeri maupun luar negeri. Secara keseluruhan, kepemilikan institusional berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan serta arah kebijakan strategisnya (Triyanto & Sulistyaningrum, 2023). Kondisi ini mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan dengan transparansi dan akurasi yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kualitas informasi keuangan, risiko yang dihadapi auditor menjadi lebih rendah, sehingga kebutuhan akan prosedur

pengujian substansif berkurang yang menyebabkan penurunan biaya audit (*Audit Fee*). Dengan demikian, Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi, maka biaya audit semakin rendah.

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee*.**

### **Kepemilikan Pemerintah**

Kepemilikan Pemerintah merupakan proporsi kepemilikan saham milik negara maupun badan pemerintah. Fungsi pengawasan dari kepemilikan pemerintah menjadi tanggung jawab birokrasi namun, tidak memiliki kewajiban apapun, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan. Kurangnya efektivitas fungsi pengawasan dari pihak principal dapat meningkatkan risiko terjadinya asimetri informasi, karena manajemen memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan (Anindita & Rohman, 2021; M. P. Sari et al., 2023). Terdapat ketidaksesuaian dalam peran pengawasan birokrasi terhadap aktivitas manajemen, karena tidak jelas apakah pengawasan tersebut ditujukan untuk kepentingan pemerintah, kepentingan pribadi pejabat, atau kesejahteraan sosial. Hal ini terjadi karena fungsi pengendalian pada kepemilikan pemerintah tidak seimbang dengan arus kas yang diperoleh dari kepemilikan saham secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang lebih tinggi, maka biaya audit semakin tinggi.

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*.**

### **Kepemilikan Asing**

Kepemilikan Asing merujuk pada porsi saham Perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan hukum, atau instansi pemerintah beserta unit-unitnya yang berasal dari luar negeri, termasuk juga individu, badan hukum, dan pemerintah yang tidak berasal dari Indonesia. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing memerlukan Tingkat pengawasan manajerial yang lebih ketat karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan pihak manajemen yang dapat memicu konflik kepentingan. Dengan kondisi tersebut, manajer sering kali lebih memprioritaskan kepentingan anak perusahaan dibandingkan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan asing umumnya menanggung biaya audit yang lebih tinggi karena investor asing menuntut audit yang lebih berkualitas guna menjamin transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Hanifah & Adiwibowo, 2020). Oleh karena itu, semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh investor asing, maka semakin tinggi pula biaya audit yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan untuk jasa auditor eksternal.

**H<sub>4</sub>: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*.**

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Prof.Dr.Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif merujuk pada jenis penelitian dengan rancangan yang sistematis, terencana dan terstruktur secara jelas. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2021 sampai 2023. Menurut Prof.Dr.Sugiyono (2019) sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan mampu menggambarkan atau mewakili kondisi populasi secara keseluruhan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan melalui pendekatan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan Bursa Malaysia secara berturut-turut periode penelitian 2021-2023.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan secara lengkap periode 2021-2023.

### 3. Perusahaan yang sesuai dengan variabel *audit fee* yang diteliti

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Prof.Dr.Sugiyono (2019), data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, bisa diperoleh dari dokumentasi perusahaan, buku, jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari data annual report dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2021-2023 yang diakses melalui website resmi dan website resmi perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data perhitungan statistik program *eviews 12*. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya melakukan serangkaian analisis data yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan metode data panel.

**Tabel 1.** Definisi Variabel

No	Definisi Konseptual Variabel	Definisi Operasional	Literatur
1.	<i>Audit fee</i> biasa diperoleh dari annual report pada bagian terdapat audit eksternal biasanya pada bentuk jasa audit atau biaya audit baik dalam bentuk angka yang memisahkan biaya audit atau biaya non audit. Nilai tersebut dicatat dalam bentuk rupiah atau ringgit dan sering dikonversi ke logaritma (Ln) untuk analisis.	$Fee\ Audit = Ln (Fee\ Audit)$	(Afdhalastin & Yuyetta, 2021)
2.	Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan yang merujuk pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan	$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajer}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$	(Erwan & Dewi Kartika, 2022)
3.	Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Kepemilikan ini dapat menciptakan pengawasan yang efektif.	$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$	(Malahayati, 2021)
4.	Kepemilikan pemerintah merujuk pada proporsi saham suatu perusahaan milik negara (BUMN) yang dikuasai oleh pemerintah, baik melalui bentuk badan usaha perum, perjan, maupun persero	$KP = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$	(Basuki, 2020)
5.	Kepemilikan Asing adalah persentase saham biasa suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu, entitas hukum, atau instansi pemerintah asing beserta unit-unitnya. Kepemilikan asing dilakukan berdasarkan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak luar negeri sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.	$KA = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki asing}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$	(Gautama & Fransiskus E. Daromes, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada periode 2021-2023. Total perusahaan

yang diambil berdasarkan kriteria sampel adalah 465 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia untuk penelitian ini, dengan observasi yang dilakukan selama 3 tahun sehingga total observasi 1395 dan 300 menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditetapkan yaitu:

**Tabel 2.** Pemilihan Sampel Indonesia

No	Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria	Jumlah
Populasi			956
1.	Perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut di BEI periode 2021-2023	(55)	901
2.	Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan secara lengkap periode 2021-2023	(343)	558
3.	Perusahaan yang sesuai dengan variabel yang diteliti	(93)	465
Total sampel penelitian			465
Total keseluruhan observasi selama 3 tahun			1.395

Pada Tabel 2, dari total 956 perusahaan BEI, melalui proses *purposive sampling* yang memperhatikan variabel kelengkapan data dan kesesuaian, diperoleh 465 perusahaan sebagai sampel akhir. Proses eliminasi dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelengkapan data laporan tahunan dan kesesuaian dengan variabel *audit fee*. Jumlah total 1.395 observasi menunjukkan Kumpulan data kuat dan komprehensif untuk dianalisis dalam periode 3 tahun penelitian.

**Tabel 3.** Pemilihan Sampel Malaysia

No	Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria	Jumlah
Populasi			400
1.	Perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Malaysia periode 2021-2023	(5)	395
2.	Perusahaan yang menyajikan <i>mannual report</i> secara lengkap periode 2021-2023	(127)	268
3.	Perusahaan yang sesuai dengan variabel yang diteliti	(68)	100
Total sampel penelitian			100
Total keseluruhan observasi selama 3 tahun			300

Pada Tabel 3, dari total 400 perusahaan Bursa Malaysia, melalui proses *purposive sampling* yang memperhatikan variabel kelengkapan data dan kesesuaian, diperoleh 100 perusahaan sebagai sampel akhir. Proses eliminasi dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelengkapan data laporan tahunan dan kesesuaian dengan variabel *audit fee*. Jumlah total 300 observasi menunjukkan Kumpulan data kuat dan komprehensif untuk dianalisis dalam periode 3 tahun penelitian.

## Temuan Hasil Penelitian

### 1. Statistik Deskriptif

**Tabel 4.** Hasil Analisis Deskriptif Indonesia

	<i>Audit Fee</i>	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan Asing
Mean	20.31718	0.179871	0.465567	0.042493	0.243535
Median	20.21244	0.000164	0.481336	0.000000	0.000000
Maximum	27.16899	8.393159	5.334686	9.088177	32.33284
Minimum	14.83796	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	1.345703	0.800209	0.458608	0.470366	1.536000
Skewness	0.714628	7.053691	4.222489	17.02373	19.68786
Kurtosis	4.468598	55.84317	39.46920	312.1171	410.3588

Pada Tabel 4, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa biaya audit memiliki rata-rata yang relatif stabil variasi. Kepemilikan manajerial rata-rata sangat rendah yang berarti sebagian besar perusahaan tidak dimiliki oleh pihak manajemen. Kepemilikan instritusional menjadi yang paling dominan, meskipun terdapat beberapa nilai tinggi. Kepemilikan pemerintah pada umumnya rendah dan hanya muncul pada sedikit perusahaan. Dan kemilikan asing juga rendah secara mediam, namun memiliki beberapa nilai eskترم pada perusahaan tertentu.

**Tabel 5.** Hasil Analisis Deskriptif Malaysia

	<i>Audit Fee</i>	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan Asing
Mean	12.64518	0.227808	0.442060	0.026283	0.078326
Median	12.61037	0.103471	0.382650	0.000000	0.008963
Maximum	17.04236	2.224610	6.923569	0.557694	0.863256
Minimum	6.282814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	1.106654	0.349867	0.610429	0.088140	0.157835
Skewness	0.335923	3.084315	8.413139	4.510282	2.604626
Kurtosis	8.298210	15.72130	87.40115	24.49423	9.376417

Pada Tabel 5, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa biaya audit memiliki rata-rata 12,64518 dengan variasi dan distribusi condong ke kanan. Kepemilikan manajerial rata-rata rendah, ditunjukkan oleh nilai median yang kecil dan distribusi yang sangat tidk merata. Kepemilikan institusional menjadi paling dominan, meskipun terdapat beberapat nilai ekstrem pada perusahaan tertentu. Kepemilikan pemerintah pada umunya sangat rendah dan hanya muncul sedikit perusahaan. Sementara itu kepemilikan asing juga relative kecil, namun terdapat beberapa perusahaan dengan proporsi kepemilikan asing jauh lebih tinggi.

### 2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

#### a. *Common Effect Model (CEM)*

**Tabel 6.** Hasil Pengujian CEM Indonesia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.00283	0.085211	246.4817	0.0000
Kepemilikan manajerial	-0.022754	0.085555	-0.265955	0.7904
Kepemilikan institusional	-0.864063	0.164623	-5.248730	0.0000
Kepemilikan pemerintah	-0.098830	0.076739	-1.287881	0.1983
Kepemilikan asing	0.100956	0.049440	2.041989	0.0416

Pada Tabel 6, hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki koefisien negatif dan tidak signifikan ( $p=0,7904$ ), sehingga tidak berpengaruh terhadap biaya audit. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan (koefisien  $-0,864063$ ;  $p = 0,0000$ ) yang berarti semakin besar kepemilikan institusional semakin rendah biaya audit. Kepemilikan pemerintah juga semakin koefisien negatif, namun tidak signifikan ( $p=0,1983$ ), sehingga tidak dapat disimpulkan mempengaruhi biaya audit. Sementara kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan (koefisien  $0.100956$ ;  $p = 0.0416$ ), menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi pemegang saham asing yang lebih besar cenderung membayar biaya audit yang lebih tinggi.

**Tabel 7.** Hasil Pengujian CEM Malaysia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.34277	0.104261	118.3837	0.0000
Kepemilikan manajerial	-0.046418	0.027444	-1.691384	0.0920
Kepemilikan institusional	0.063287	0.105182	0.601689	0.5479
Kepemilikan pemerintah	4.441561	0.954727	4.652178	0.0000
Kepemilikan asing	0.418981	0.428620	0.977513	0.3293

Pada Tabel 7, hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit. kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit. kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, artinya semakin besar porsi kepemilikan negara semakin tinggi biaya audit yang dibayar perusahaan. Sementara itu, kepemilikan asing memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap biaya audit.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

**Tabel 8.** Hasil Pengujian FEM Indonesia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.13899	39.54850	0.635650	0.5254
Kepemilikan manajerial	0.017964	0.039537	0.454366	0.6498
Kepemilikan institusional	-0,255309	0.352140	-0.725020	0.4689
Kepemilikan pemerintah	-76.12111	658.0412	-0.115678	0.9080
Kepemilikan asing	-0,092400	0.071066	-1.300289	0.1944

Pada Tabel 8, seluruh variabel kepemilikan menunjukkan nilai prob  $> 0,05$  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien manajerial positif, sisanya negatif, namun semuanya tidak terbukti secara statistik.

**Tabel 9.** Hasil Pengujian FEM Malaysia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.53851	0.194454	64.48071	0.0000
Kepemilikan manajerial	-0.014949	0.048547	-0.307928	0.7585
Kepemilikan institusional	-0.005241	0.163430	-0.032072	0.9745
Kepemilikan pemerintah	0.580593	2.207229	0.263042	0.7928
Kepemilikan asing	0.544637	0.914870	0.595317	0.5525

Pada Tabel 9, seluruh variabel kepemilikan menunjukkan nilai prob  $> 0,05$  sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien manajerial dan institusional

bernilai negatif, sedangkan pemerintah dan asing positif, namun semuanya tidak terbukti secara statistik.

c. *Random Effect Model (REM)*

**Tabel 10.** Hasil Pengujian REM Indonesia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.79222	0.117426	177.0661	0.0000
Kepemilikan manajerial	0.006375	0.038639	0.164984	0.8690
Kepemilikan institusional	-0.677377	0.203943	-3.321413	0.0010
Kepemilikan pemerintah	-0.076950	0.128674	-0.598023	0.5501
Kepemilikan asing	-0.002611	0.053554	0.048749	0.0096

Pada Tabel 10, hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap biaya audit karena koefisiennya tidak signifikan. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga semakin besar kepemilikan institusional maka biaya audit semakin rendah. Sementara itu, kepemilikan asing menunjukkan pengaruh yang signifikan meskipun dengan koefisien yang kecil. Secara dekriptif, perbedaan proposi kepemilikan antar perusahaan mempengaruhi hasil regresi terutsms pada variabel institusional dan asing yang memiliki variasi lebih besar.

**Tabel 11.** Hasil Pengujian REM Malaysia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.85469	0.150689	82.19392	0.0000
Kepemilikan manajerial	-0.037532	0.031109	-1.206446	0.2288
Kepemilikan institusional	0.031886	0.118126	0.269936	0.7874
Kepemilikan pemerintah	3.460161	1.248792	2.770807	0.0060
Kepemilikan asing	0.492899	0.541993	0.909419	0.0036

Pada Tabel 11, hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya audit karena nilai koefisiennya tidak signifikan. Sebaliknya kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, sehingga perusahaan dengan proporsi kepemilikan pemerintah yang lebih besar cenderung membayar biaya audit lebih tinggi. Kepemilikan asing juga menunjukkan pengaruh positif signifikan, menandakan bahwa semakin besar kepemilikan oleh investor asing maka biaya audit semakin meningkat. Secara deskriptif, variasi terbesar terdapat pada kepemilikan pemerintah dan asing, sehingga keduanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan biaya audit.

3. Uji Kesesuaian Model

a. Uji Chow

**Tabel 12.** Hasil Uji Chow Indonesia

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross section F	24.194502	(196,353)	0.0000
Cross-section Chisquare	1478.942294	196	0.0000

**Tabel 13.** Hasil Uji Chow Malaysia

<b>Effects Test</b>	<b>Statistic</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section F	10.953137	(87,164)	0.0000
Cross-section Chisquare	491.127391	87	0.0000

Dari hasil Uji Chow pada kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Probability Cross Section F*  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik antar perusahaan secara statistik penting dan tidak dapat diabaikan, maka model *fixed effect* lebih baik digunakan.

## b. Uji Hausman

**Tabel 14.** Uji Hausman Indonesia

<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section random	7.523372	4	0.1107

**Tabel 15.** Uji Hausman Malaysia

<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section random	2.792634	4	0.5931

Dari hasil Uji Chow pada kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Probability Cross Section F*  $0,000 > 0,05$  menunjukkan bahwa perbedaan antar perusahaan dianggap bersifat acak dan tidak bergantung pada variabel independen, maka *random effect* lebih baik digunakan.

## c. Uji Lagrange Multiplier

**Tabel 16.** Hasil dari Uji Lagrange Multiplier Indonesia

	<b>Cross-Section</b>	<b>Time</b>	<b>Both</b>
<b>Breusch-Pagan</b>	430.7532 (0.0000)	1.214419 (0.2705)	431.9677 (0.0000)

**Tabel 17.** Hasil dari Uji Lagrange Multiplier Malaysia

	<b>Cross-Section</b>	<b>Time</b>	<b>Both</b>
<b>Breusch-Pagan</b>	154.0301 (0.0000)	0.119187 (0.7299)	154.1493 (0.0000)

Dari hasil uji lagrange multiplier pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *probitabilitas cros section F*  $< 0.05$  sedangkan waktu komponen tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi perusahaan lebih dominann dibandingkan variasi antar waktu, maka model *random effect* lebih baik digunakan. Jadi kedua negara tersebut sama-sama menggunakan *random effect*.

## 4. Uji Asumsi Klasik

## a. Uji Multikolinearitas

**Tabel 18.** Hasil Uji Multikolinearitas Indonesia

	<b>Coefficient Variance</b>	<b>Uncetered</b>	<b>Coefficient Variance</b>
C	0.002777	2.172358	NA
X1	0.002011	1.059059	1.008014
X2	0.006149	2.049522	1.010388

	<b>Coefficient Variance</b>	<b>Uncetered</b>	<b>Coefficient Variance</b>
X3	0.005838	1.019442	1.011171
X4	0.000543	1.028218	1.002950

**Tabel 19.** Hasil Uji Multikolinearitas Malaysia

	<b>Coefficient Variance</b>	<b>Uncetered</b>	<b>Coefficient Variance</b>
C	0.009794	2.550773	NA
X1	0.032442	1.469259	1.030779
X2	0.010492	1.548822	1.014830
X3	0.508282	1.116409	1.024966
X4	0.157841	1.272856	1.020663

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF pada sampel perusahaan di Indonesia maupun Malaysia, tidak terdapat indikasi adanya multikolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini, baik untuk Indonesia maupun Malaysia, bebas dari masalah multikolinearitas dan layak untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

#### b. Heteroskedastitas

**Tabel 20.** Hasil Uji Heteroskedastisitas Indonesia

Obs*R-squared	1.032732	Prob.Chi-Square(4)	0.9048
---------------	----------	--------------------	--------

**Tabel 21.** Hasil Uji Heteroskedastisitas Malaysia

Obs*R-squared	7.362331	Prob.Chi-Square(4)	0.1179
---------------	----------	--------------------	--------

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* diperoleh nilai probabilitas di negara Indonesia sebesar  $0.9048 > 0.05$  sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan, negara Malaysia hasil uji heteroskedastisitasnya diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0.1179 > 0.05$  sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi masalah uji tersebut. Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

#### 5. Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 22.** Hasil Analisis Regresi Data Panel Indonesia

Variabel	<b>Coefficient</b>	<b>Std.Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	20.79222	0.117426	177.0661	0.0000
X1	0.006375	0.038639	0.164984	0.8690
X2	-0.677377	0.203943	-3.321413	0.0010
X3	-0.076950	0.128674	-0.598023	0.5501
X4	-0.002611	0.053354	0.048749	0.0096

Berdasarkan hasil regresi panel persamaan regresi data panel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$AF = 20.79222 + 0.006375 KM - 0.677377 KI - 0.076950 KP - 0.002611 KA + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Pemerintah, dan Kepemilikan Asing dalam penelitian ini bernilai 0, maka *Audit Fee* sebesar 20.79222.
- b. Nilai koefisien  $\beta$  (Kepemilikan Manajerial) sebesar 0.006375 yang artinya jika variabel Kepemilikan Manajerial ditingkatkan sebesar 1 satuan Kepemilikan Manajerial, maka diikuti dengan peningkatan *Audit Fee* sebesar 0.006375.
- c. Nilai koefisien  $\beta$  (Kepemilikan Institusional) sebesar - 0.677377 yang artinya jika variabel Kepemilikan Institusional ditingkatkan sebesar 1 satuan Kepemilikan Institusional, maka diikuti dengan penurunan *Audit Fee* sebesar - 0.677377.
- d. Nilai koefisien  $\beta$  (Kepemilikan Pemerintah) sebesar - 0.076950 yang artinya jika variabel Kepemilikan Pemerintah ditingkatkan sebesar 1 satuan Kepemilikan Pemerintah, maka diikuti dengan penurunan *Audit Fee* sebesar - 0.076950.
- e. Nilai koefisien  $\beta$  (Kepemilikan Asing) sebesar - 0.002611 yang artinya jika variabel Kepemilikan Asing ditingkatkan sebesar 1 satuan Kepemilikan Asing, maka diikuti dengan penurunan *Audit Fee* sebesar - 0.002611.
- f. Nilai konstanta  $\alpha$  sebesar 20.79222 yang artinya variabel *Audit Fee*, Kepemilikan Manajerial,

**Tabel 23.** Hasil Analisis Regresi Data Panel Malaysia

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	12.38575	0.150689	82.19392	0.0000
X1	-0.037532	0.031109	-1.206446	0.2288
X2	0.031886	0.118126	0.269936	0.7874
X3	3.460161	0.248792	2.770807	0.0060
X4	0.492899	0.541993	0.909419	0.0036

Berdasarkan hasil regresi panel persamaan regresi data panel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$AF = 12.38575 - 0.037532 KM + 0.031886 KI + 3.460161 KP + 0.492899 KA + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta  $\alpha$  sebesar 12.38575 yang artinya variabel *Audit Fee*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Pemerintah, dan Kepemilikan Asing dalam penelitian ini bernilai 0, maka *Audit Fee* sebesar 12.38575.
- b. Nilai koefisien  $\beta$  (Kepemilikan Manajerial) sebesar - 0.037532 yang artinya jika variabel Kepemilikan Manajerial ditingkatkan sebesar 1 satuan Kepemilikan Manajerial, maka diikuti dengan penurunan *Audit Fee* sebesar - 0.037532.
- c. Nilai koefisien  $\beta$  (Kepemilikan Institusional) sebesar 0.031886 yang artinya jika variabel Kepemilikan Institusional ditingkatkan sebesar 1 satuan Kepemilikan Institusional, maka diikuti dengan peningkatan *Audit Fee* sebesar 0.031886.
- d. Nilai koefisien  $\beta$  (Kepemilikan Pemerintah) sebesar 3.460161 yang artinya jika variabel Kepemilikan Pemerintah ditingkatkan sebesar 1 satuan Kepemilikan Pemerintah, maka diikuti dengan penurunan *Audit Fee* sebesar 3.460161.
- e. Nilai koefisien  $\beta$  (Kepemilikan Asing) sebesar 0.492899 yang artinya jika variabel Kepemilikan Asing ditingkatkan sebesar 1 satuan Kepemilikan Asing, maka diikuti dengan peningkatan *Audit Fee* 0.492899.

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Hasil pengujian statistik koefisien determinasi sebagai berikut:

**Tabel 24.** Hasil Koefisien Determinasi Indonesia

Item	Nilai
Adjusted R-Squared Data Panel	0.0215
Adjusted R-Squared MRA	0.0144

**Tabel 25.** Hasil Koefisien Determinasi Malaysia

Item	Nilai
Adjusted R-Squared Data Panel	0.0481
Adjusted R-Squared MRA	0.0329

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, pada Indonesia nilai *Adjusted R-Squared* data panel sebesar 0,0215 atau 2,15%. Hal ini mengidentifikasi bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi biaya audit sebesar 2,15%. Maka dapat diartikan sisanya 97,85% dapat didistribusikan kepada faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi pada Malaysia nilai *Adjusted R-Squared* data panel sebesar 0.0481 atau 4,81%. Hal ini mengidentifikasi bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi biaya audit sebesar 4.81%. Maka dapat diartikan sisanya 95.19% dapat didistribusikan kepada faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi perbandingan untuk kedua negara tersebut sama-sama memiliki nilai koefisien determinasi yang rendah, namun hasil di Malaysia relatif lebih besar dibandingkan Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi pada data Malaysia yang memiliki kemampuan penjelasan yang lebih kuat terhadap variabel dependen, baik pada analisis data panel maupun MRA.

b. Uji t (parsial)

**Tabel 26.** Hasil Hipotesis (Uji t) Indonesia

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	20.79222	0.117426	177.0661	0.0000
X1	0.006375	0.038639	0.164984	0.8690
X2	-0.677377	0.203943	-3.321413	0.0010
X3	-0.076950	0.128674	-0.598023	0.5501
X4	-0.002611	0.053354	0.048749	0.0096

**Tabel 27.** Hasil Hipotesis (Uji t) Malaysia

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	12.38575	0.150689	82.19392	0.0000
X1	-0.037532	0.031109	-1.206446	0.2288
X2	0.031886	0.118126	0.269936	0.7874
X3	3.460161	0.248792	2.770807	0.0060
X4	0.492899	0.541993	0.909419	0.0036

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji parsial t sebagai berikut:

1) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Fee*

Indonesia Hasil analisis menggunakan perangkat lunak *evIEWS 12* pada tabel di atas yaitu variabel kepemilikan manajerial dengan nilai probabilitas sebesar 0.8690. Berdasarkan kriteria pada uji t, nilai probabilitas  $0.8690 > 0.05$  maka dapat dinyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Audit Fee*. Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan

bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* ditolak. Sedangkan di Malaysia variabel kepemilikan manajerial 0.2288. Berdasarkan kriteria pada uji t, nilai prob 0.2288 > 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Audit Fee*. Oleh karena itu hipotesis pertama sama sama ditolak.

#### 2) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Audit Fee*

Hasil analisis menggunakan perangkat lunak *evIEWS 12* pada tabel di atas yaitu variabel kepemilikan institusional dengan nilai probabilitas sebesar 0.0010 Berdasarkan kriteria pada uji t, nilai probabilitas 0.0010 < 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *Audit Fee*. Oleh karena itu hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* diterima. Sedangkan di Malaysia, kepemilikan institusional 0.7874. Berdasarkan kriteria pada uji t, nilai prob 0.7874 > 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee*. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* jadi ditolak.

#### 3) Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *Audit Fee*

Hasil analisis menggunakan perangkat lunak *evIEWS 12* pada tabel di atas yaitu variabel kepemilikan pemerintah dengan nilai probabilitas sebesar 0.5501 Berdasarkan kriteria pada uji t, nilai probabilitas 0.5501 > 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Audit Fee*. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang menyatakan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* ditolak. Sedangkan di Malaysia, kepemilikan pemerintah sebesar 0.0060. Berdasarkan kriteria pada uji t, nilai prob 0.0060 < 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*. Oleh karena itu menyatakan hipotesis ketiga diterima.

#### 4) Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Audit Fee*

Hasil analisis menggunakan perangkat lunak *evIEWS 12* pada tabel di atas yaitu variabel kepemilikan asing dengan nilai probabilitas sebesar 0.0096. Berdasarkan kriteria pada uji t, nilai probabilitas 0.0096 > 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*. Oleh karena itu hipotesis keempat yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* diterima. Sedangkan di Malaysia, kepemilikan asing sebesar 0.0036. Berdasarkan kriteria pada uji t, nilai prob 0.0036 > 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*. Oleh karena itu hipotesis keempat diterima.

#### c. Uji f (Simultan)

**Tabel 28.** Hasil Uji Hipotesis (Uji f) Indonesia

Item	Nilai
F-statistic	3.0276
Prob(F-statistic)	0.0173

**Tabel 29.** Hasil Uji Hipotesis (Uji f) Malaysia

Item	Nilai
F-statistic	3.1724
Prob(F-statistic)	0.0144

Berdasarkan kedua tabel di atas, hasil uji f (simultan) dapat dilihat bahwa nilai prob (*f-statistic* sebesar 0.000000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Fee*.

## 7. Perbandingan Hasil Penelitian pada Indonesia dan Malaysia

Tabel berikut membandingkan arah koefisien regresi (positif/negatif) antara Indonesia dan Malaysia pada masing-masing variabel struktur kepemilikan.

**Tabel 30.** Arah Koefisien Indonesia dan Malaysia

Variabel	Indonesia	Malaysia	Perbandingan
Kepemilikan Manajerial	Positif ( $\beta = 0,006$ )	Negatif ( $\beta = -0,037$ )	Berbeda: arah berlawanan
Kepemilikan Institusional	Negatif ( $\beta = -0,677$ )	Positif ( $\beta = 0,031$ )	Berbeda: arah berlawanan
Kepemilikan Pemerintah	Negatif ( $\beta = -0,076$ )	Positif ( $\beta = 3,460$ )	Berbeda: arah berlawanan
Kepemilikan Asing	Negatif kecil ( $\beta = -0,002$ )	Positif ( $\beta = 0,492$ )	Berbeda: Indonesia negatif, Malaysia positif

Berdasarkan Tabel tersebut Perbandingan arah koefisien menunjukkan adanya perbedaan struktural yang kuat antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, mayoritas variabel kepemilikan cenderung memiliki koefisien negatif, mencerminkan bahwa semakin kuat mekanisme kepemilikan (institusional, pemerintah, asing), semakin rendah kebutuhan audit secara relatif karena pengendalian internal dianggap lebih efektif. Sebaliknya, di Malaysia sebagian besar koefisien justru positif, menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan tertentu (khususnya pemerintah dan asing) menghadapi tuntutan transparansi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prosedur audit yang lebih ekstensif dan menghasilkan audit fee lebih besar. Perbedaan ini mencerminkan konteks kelembagaan kedua negara: Malaysia memiliki sistem governance dan regulasi audit yang lebih ketat, sehingga setiap aliran kepemilikan memicu peningkatan risiko audit dan menaikkan audit fee, sedangkan di Indonesia mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya terstandardisasi sehingga variabel kepemilikan lebih sering menurunkan audit fee. Hal ini menegaskan bahwa regulasi, efektivitas pengawasan, dan kualitas tata kelola memengaruhi cara struktur kepemilikan berdampak pada audit fee lintas negara..

## 8. Pembahasan

### a. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Audit Fee

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Audit Fee **ditolak** yang berarti Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif terhadap Audit Fee di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia.

Kepemilikan manajerial merupakan bentuk investasi dalam perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen, direksi, atau individu yang memiliki wewenang dalam menjalankan operasional perusahaan (Gozali et al., 2023). Kepemilikan ini merupakan salah satu komponen dalam struktur kepemilikan perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi diyakini dapat menurunkan biaya audit. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perubahan orientasi kepentingan dari pihak manajemen (Wibowo & Parasetya, 2024). Manajer berperan sebagai agen, ketika memiliki saham perusahaan, tidak hanya sebagai agen tetapi juga mengambil peran sebagai pemilik (principal).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif terhadap Audit Fee. Meskipun persentase kepemilikan manajerial mengalami perubahan, besaran Audit Fee tetap stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh terhadap Audit Fee. Walaupun kepemilikan saham oleh manajer

berpotensi menyatukan kepentingan manajer dan pemegang saham serta meningkatkan pengendalian internal, dampaknya terhadap *Audit Fee* tidak signifikan karena porsi kepemilikan manajerial relatif kecil (kurang dari 5%) sehingga belum cukup kuat memengaruhi kebijakan perusahaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Soepriyanto et al., 2025) Ardianingsih & Setiawan (2022) serta M. P. Sari et al. (2023) yang juga menyimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Audit Fee*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novriansa et al. (2023), yang menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan biaya audit. Hal ini sama dengan penelitian Wibowo & Parasetya (2024), hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit dalam perspektif teori keagenan. Dalam kondisi ini, perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung menanggung biaya audit yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan akan prosedur audit mendalam karena manajemen dianggap insentif lebih besar untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan. Oleh karena itu, perusahaan yang dimiliki kepemilikan manajerial yang tinggi umumnya menanggung beban biaya audit yang rendah. Jadi dengan adanya kepemilikan manajerial yang tinggi diyakini mampu menurunkan *Audit Fee* karena berkurangnya konflik keagenan.

#### b. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Audit Fee*

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* **diterima** yang berarti Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* ditolak yang berarti Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia.

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh entitas entitas kekelembagaan seperti instansi pemerintah saham, lembaga perbankan, dan institusi keuangan lainnya, baik yang berasal memiliki dalam negeri atau luar negeri (Risman & Zuraida, 2022). Berdasarkan teori agensi, suatu pihak dalam perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga penting bagi perusahaan untuk mencegah potensi konflik yang dapat merugikan dan menurunkan nilai perusahaan (Afdhalastin & Yuyetta, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal guna memantau dan menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.

Hasil dalam penelitian ini Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan institusional yang tinggi berdampak pada struktur modal perusahaan dan menentukan kebijakan strategis. Hal ini mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara lebih transparan dan akurat. Seiring meningkatkannya kualitas informasi keuangan, risiko yang dihadapi auditor menjadi lebih rendah, sehingga penggunaan prosedur pengujian substantif dapat diminimalkan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya *Audit Fee*. Jadi perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi, maka biaya audit semakin rendah.

Sedangkan hasil penelitian di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee*. Penggunaan jasa audit tidak hanya pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, tetapi juga berlaku bagi perusahaan dengan berbagai struktur kepemilikan. Umumnya, baik pemegang saham institusional maupun non-institusional berupaya melakukan pengawasan optimal melalui pemanfaatan auditor profesional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan tetap memerlukan jasa audit yang berkualitas. Perusahaan juga menginginkan hasil audit yang andal

pada laporan keuangan agar mampu menarik minat investor, sehingga kebutuhan akan auditor profesional tidak hanya berasal dari kepemilikan institusional semata.

Hasil penelitian di seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hariono & Iswara, (2015) bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* karena pengawasan yang ketat dan pengelolaan risiko yang baik dapat mengurangi kebutuhan audit yang mendalam yang mempengaruhi turunnya *Audit Fee*. Investor institusional seperti bank, dana pension, atau manajer investasi dengan kepemilikan tinggi, mereka bisa melakukan monitoring manajemen lebih intensif dibandingkan pemegang saham individu. Hal ini mengurangi peluang terjadinya tindakan oportunistik.

Sedangkan hasil penelitian di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia sejalan dengan penelitian Viyati et al., (2024) yang menyatakan bahwa ada kemungkinan auditor dipengaruhi oleh pedoman atau regulasi eksternal (bukan langsung oleh kepemilikan institusional), misalnya standar profesi audit, regulasi pasar modal, atau reputasi auditor, sehingga kepemilikan institusional tidak menjadi faktor penting dalam negosiasi *Audit Fee*.

### c. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap *Audit Fee*

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* **ditolak** yang berarti Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* **diterima** yang berarti Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia.

Kepemilikan pemerintah merupakan proporsi kepemilikan saham milik negara maupun badan pemerintah. Fungsi pengawasan dari kepemilikan pemerintah menjadi tanggung jawab birokrasi namun, tidak memiliki kewajiban apapun, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan. Kurangnya efektivitas fungsi pengawasan dari pihak prinsipal dapat meningkatkan risiko terjadinya asimetri informasi, karena manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk mendominasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Hasil penelitian ini Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan milik pemerintah memiliki mekanisme pengendalian internal, transparansi, dan pengawasan yang setara atau mendekati perusahaan swasta, auditor mungkin memandang risiko auditnya tidak jauh berbeda. Jika regulasi dan standar audit di suatu negara menetapkan persyaratan minimum yang sama untuk semua perusahaan publik (termasuk pemerintah), maka kepemilikan pemerintah mungkin bukan faktor risiko tambahan yang diperhitungkan secara khusus (Hanifah & Adiwibowo, 2020).

Sedangkan hasil penelitian di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*. Perusahaan yang dimiliki pemerintah biasanya menghadapi ekspektasi publik, regulasi, dan pengawasan lebih ketat. Pemerintah sebagai pemilik sering diharuskan melaporkan penggunaan dana publik dengan transparansi tinggi, sehingga auditor mungkin melakukan prosedur audit yang lebih cermat atau lebih luas. Ini meningkatkan upaya audit dan biaya. Perusahaan pemerintah mungkin memiliki struktur organisasi yang rumit, pengurus yang banyak, pengawasan dari berbagai otoritas sehingga memerlukan audit yang lebih kompleks dan lebih usaha, sehingga *Audit Fee* meningkat (Fauzi & Laksito, 2019)

Hasil penelitian di seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejalan dengan penelitian (Musah et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai pemilik saham dapat melakukan fungsi pengawasan yang baik sehingga konflik agensi (antara

manajemen dan pemilik) dianggap lebih rendah atau terkendali. Auditor tidak melihat adanya risiko tambahan signifikan yang harus diimbangi dengan *Audit Fee* yang lebih tinggi.

Sedangkan hasil penelitian di seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Harahap & Prasetyo, 2018) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah bisa jadi menghadapi risiko politik atau regulasi yang lebih besar. Perubahan kebijakan pemerintah, tekanan publik atau audit kinerja terhadap penggunaan dana publik. Auditor bisa menilai bahwa risiko salah saji atau reputasi lebih besar untuk perusahaan pemerintah auditor menetapkan biaya lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko tersebut.

#### d. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Audit Fee*

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* **diterima** yang berarti Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* di seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia.

Kepemilikan asing merujuk pada porsi saham perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan hukum, atau instansi pemerintah beserta unit-unitnya yang berasal dari luar negeri, termasuk juga individu, badan hukum, dan pemerintah yang tidak berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing memiliki batasan dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif karena adanya kendala geografis, seperti perbedaan negara. Rendahnya efektivitas pengendalian internal ini dapat meningkatkan *Audit Fee* (M. P. Sari et al., 2023).

Hasil dari penelitian ini Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*. Investor asing umumnya menuntut transparansi dan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Mereka menginginkan audit yang ketat karena keterbatasan informasi dan jarak geografis membuat mereka lebih sulit melakukan pengawasan langsung. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perusahaan biasanya memilih auditor besar atau meminta lingkup audit lebih luas, sehingga meningkatkan *Audit Fee*. Kepemilikan asing sering kali mengharuskan perusahaan mengikuti standar internasional atau menyediakan laporan dalam bahasa asing. Hal ini menambah beban kerja auditor karena laporan perlu lebih detail, komprehensif, dan sesuai dengan standar global. Kondisi ini mendorong peningkatan *Audit Fee*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani & Laksito (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Fee*, yang berarti semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh investor asing, maka semakin tinggi pula biaya audit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk jasa auditor eksternal.

#### e. Perbandingan Hasil Penelitian Indonesia dan Malaysia

Hasil perbandingan regresi menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan terhadap *Audit Fee* tidak sepenuhnya sama antara Indonesia dan Malaysia. Pada variabel kepemilikan institusional, Indonesia menunjukkan pengaruh negatif, sedangkan Malaysia tidak menunjukkan pengaruh apa pun. Perbedaan ini mencerminkan efektivitas monitoring investor institusional di Indonesia yang lebih kuat, di mana kepemilikan institusional terbukti mampu menurunkan risiko audit sehingga menurunkan *Audit Fee* (Hariono & Iswara, 2015; Afdhalastin & Yuyetta, 2021). Sebaliknya, di Malaysia, hasil ini konsisten dengan temuan Viyati et al. (2024) dan Abd Rahim & Yusof (2018) yang menunjukkan bahwa regulasi audit yang kuat dan standar profesi yang seragam membuat kepemilikan institusional tidak menjadi faktor dominan dalam penentuan *Audit Fee*.

Pada variabel kepemilikan manajerial, Indonesia menunjukkan tidak adanya pengaruh, sedangkan Malaysia menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Munisi (2023) dan Sari et al. (2023) bahwa porsi kepemilikan manajerial di Indonesia umumnya sangat

kecil (<5%) sehingga tidak cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan audit. Sebaliknya, di Malaysia, penelitian Ganesan et al. (2019) dan Farooq et al. (2018) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi membuat auditor memandang adanya potensi konflik keagenan yang lebih besar, sehingga prosedur audit diperluas dan Audit Fee meningkat.

Untuk kepemilikan asing, hasil kedua negara konsisten yaitu berpengaruh positif. Temuan ini mendukung penelitian Andriyani & Laksito (2017) serta Kalsum et al. (2021) yang menyatakan bahwa investor asing menuntut transparansi tinggi, pelaporan sesuai standar internasional, serta audit yang lebih ketat untuk mengatasi risiko informasi lintas negara. Hal ini menyebabkan auditor membutuhkan upaya audit tambahan, sehingga Audit Fee meningkat baik pada konteks Indonesia maupun Malaysia. Pada aspek ukuran perusahaan dan kompleksitas operasi, kedua negara menunjukkan hasil yang sama: semakin besar dan semakin kompleks perusahaan, semakin tinggi Audit Fee yang dibutuhkan, sebagaimana dijelaskan oleh Nelson & Rusdi (2015) dan Sari et al. (2023).

Sementara itu, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan di kedua negara, yang memperkuat temuan Musah et al. (2021) serta Novriansa et al. (2023) bahwa laba bukan merupakan faktor utama bagi auditor dalam menentukan biaya audit. Secara keseluruhan, perbedaan antarnegara terutama disebabkan oleh variasi efektivitas mekanisme corporate governance, kualitas regulasi audit, serta struktur pengawasan pemilik pada masing-masing negara. Konteks kelembagaan inilah yang menjelaskan mengapa struktur kepemilikan tertentu memiliki pengaruh berbeda terhadap Audit Fee di Indonesia dan Malaysia meskipun keduanya berada dalam kawasan ASEAN dan mengikuti standar akuntansi berbasis IFRS.

## SIMPULAN

### Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap *Audit Fee* dengan pendekatan regresi data panel lintas negara. Sintetis temuan lintas negara pada penelitian ini berupa; *audit fee* di Malaysia cenderung lebih tinggi dibandingkan Indonesia, disebabkan oleh regulasi audit yang lebih ketat dan kewajiban keterbukaan *audit fee* di Bursa Malaysia. Perbedaan sistem kelembagaan dan tingkat transparansi berperan penting, Malaysia memiliki sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih terstruktur, sementara Indonesia masih menuju tahap tersebut. Kepemilikan asing menjadi faktor dominan lintas negara yang secara konsisten meningkatkan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.

Dalam penelitian ini disimpulkan *Audit Fee* yang diproksikan menggunakan logaritma *Audit Fee* menunjukkan bahwa setiap perusahaan mempunyai biaya audit berbeda-beda. Selanjutnya struktur kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan menggunakan kepemilikan manajerial, institusional, pemerintah dan asing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan sampel sebanyak 465 dan 100 yang terdapat Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Malaysia yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2021-2023, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada tahun 2021-2023.
2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Audit Fee* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2021-2023.
3. Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Selanjutnya Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2021-2023.

4. Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Audit Fee* pada seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada tahun 2021-2023.

Implikasi pada penelitian berupa perbedaan struktur kepemilikan di Indonesia dan Malaysia memiliki dampak berbeda terhadap *audit fee* karena perbedaan sistem kelembagaan dan regulasi audit di masing-masing negara. Hasil ini memperkuat teori agensi dan teori sinyal, di Indonesia kepemilikan institusional menurunkan *audit fee* karena pengawasan investor lebih ketat, sehingga memperkuat konsep monitoring mekanisme. Sedangkan, di Malaysia kepemilikan pemerintah dan asing meningkatkan *audit fee*, memperlihatkan bahwa tata kelola dan ekspektasi transparansi publik mendorong biaya audit yang lebih tinggi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, perusahaan di Indonesia perlu meningkatkan transparansi *Audit Fee* agar dapat mencerminkan tata kelola yang baik, sebagaimana yang sudah diterapkan di Malaysia. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan tertentu harus memperhatikan implikasinya terhadap biaya audit.
2. Bagi regulator (OJK dan MIA), OJK dapat praktik transparansi *Audit Fee* seperti di Malaysia untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini penting guna memperkuat kepercayaan investor dan mengurangi potensi konflik kepentingan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang juga berpotensi mempengaruhi *Audit Fee*, seperti ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, maupun reputasi auditor. Selain itu, penelitian dapat diperluas pada periode waktu yang lebih panjang dan mencakup negara lain sebagai pembandingan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahim, M., & Yusof, M. A. M. (2018). Internal governance structure and external audit fee in Malaysia. *UNIMAS Review of Accounting and Finance*, 1(1), 113–124.
- Afdhalastin, A. D., & Yuyetta, E. N. A. (2021). Analisis pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, kompleksitas, profitabilitas, dan risiko perusahaan terhadap *audit fee*. *Jurnal of Accounting*, 10(4), 1–15.
- Alves, S. (2023). The impact of managerial ownership on audit fees: Evidence from Portugal and Spain. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), Article 2163078. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2163078>
- Andriyani, B., & Laksito, H. (2017). Analisis pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–11.
- Anindita, C., & Rohman, A. (2021). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap biaya audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–12.
- Farooq, M. U., Kazim, I., & Mahmood, A. (2018). Corporate governance and audit fees: Evidence from an emerging economy. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 12(1), 415–435.
- Fauzi, P. P. S., & Laksito, H. (2019). Pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit. *Jurnal*, 8, 1–13.
- Ganesan, Y., Narayanan, R., Haron, H., & Pitchay, A. A. (2019). Does audit fees and non-audit fees matter in audit quality? *Proceedings of the International Conference on Accounting and Finance*, 1–9.
- Gozali, E. O. D., Hamzah, R. S., & Listya, A. (2023). Menilai audit firm rotation, gender komite audit, struktur kepemilikan, *audit fee* dan kualitas audit. *Owner*, 7(2), 1149–1163.
- Hanifah, A. R., & Adiwibowo, A. S. (2020). Pengaruh kepemilikan perusahaan terhadap penetapan biaya audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), 1–11.

- Harahap, J. O., & Prasetyo, A. B. (2018). Ownership structures and characteristics influence on audit fee. *Pressacademia*, 5, 160–167.
- Hariono, T. M., & Iswara, U. S. (2015). Pengaruh ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap audit fee. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14.
- Hartomo, G. (2019). *Kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi*. Okezone Finance.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kalsum, U., Fuadah, L. F., & Safitri, R. H. (2021). Good corporate governance, ethnic CEO and audit fees. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(1), 11–23.
- Louw, F., & Indah, N. (2024). Pengaruh struktur kepemilikan, audit fee dan audit report lag terhadap integritas laporan keuangan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 109–117.
- Munisi, G. (2023). Ownership structure and audit fees: Evidence from Sub-Saharan Africa. *Accounting*, 9(1), 55–66.
- Musah, A., Okyere, B., & Agyepong, E. B. (2021). The effect of ownership structures on audit fees of listed firms in Ghana. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 22(2), 185–202. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.11337>
- Nelson, S. P., & Mohamed-Rusdi, N. F. (2015). Ownership structures influence on audit fee. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 5(4), 457–478.
- Novriansa, A., Nurullah, A., & Aryanto, A. (2023). Ownership structure and audit fees in Indonesia. *JRAK*, 15(2), 174–185.
- Nursyahrani, A., Andani, H., Azizah, N., & Afriyandi, R. (2025). Pembangunan berbasis sektor: Studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal*, 4(1), 274–288.
- Risman, L., & Zuraida, Z. (2022). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap biaya audit. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 415–424.
- Sandi, F. (2024). *Audit KAP lapkeu Indofarma temukan fraud & kerugian Rp 371 M*. CNBC Indonesia.
- Saptani, R. (2023). *ASEAN diyakini jadi pusat pertumbuhan dunia*. Media Keuangan Kemenkeu.
- Sari, D. P. (2022). Implementasi teori agensi, efisiensi pasar, teori sinyal dan teori kontrak dalam pelaporan akuntansi. *ResearchGate*, 1–27.
- Sari, M. P., Wijayaningsih, N., & Raharja, S. (2023). Faktor penentu fee audit pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Rivi Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 185–201.
- Soepriyanto, G., Kristi, Y., & Setiawan, J. (2025). Audit fees during the COVID-19 pandemic: Empirical evidence from financial sector firms in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*. Advance online publication.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Triyanto, D. N., & Sulistyaningrum, N. W. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, independensi dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap fee audit. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 488–499.
- Tysara, L. (2025). *Begini skandal mega korupsi 1MDB*. Liputan6.com.
- Viyati, G., Suryadi, N., & Nasrah, H. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional, risiko perusahaan, independensi dewan komisaris, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap audit fee. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 396–407.
- Wardani, T. J., Bambang, & Waskito, I. (2022). Pengaruh fee audit, audit tenure, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 112–124.
- Wibowo, A. I., & Parasetya, M. T. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi fee audit eksternal pada perusahaan manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2), 1–12.
- Widari, I. G. A. A., Putra, I. M. W., & Pertiwi, I. D. A. E. (2023). Kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(1), 216–225.